

ABSTRAK

TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh

Rafi Auliyaa Rizqan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaturan triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara dengan menganalisis urgensi pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturannya di negara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memiliki materi muatan yang cukup untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Gabon dan Austria yang juga menggunakan konsep triumvirat sebagai pengisi jabatan presiden sementara memiliki materi muatan pengaturan yang lebih lengkap daripada Indonesia. Dalam tujuan untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersama-sama diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dengan pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta materi muatannya dapat mengambil referensi dari negara lain yang menggunakan konsep yang sama.

Kata Kunci: Triumvirat, Pejabat Presiden Sementara.

ABSTRACT

TRIUMVIRATE IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDONESIA

By

Rafi Auliyaa Rizqan

This study aims to further examine the regulation of the triumvirate as the acting interim presidency by analyzing the urgency of establishing implementing regulations from Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and arrangements in other countries. The type of research used in this research is normative legal research with two types of problem approaches, namely the statutory and comparative approaches. The results of the research conducted showed that Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia did not have sufficient content material to accommodate events as important as the absence of the president and vice president simultaneously. Gabon and Austria, which also use the triumvirate concept as acting president, have more complete regulatory content than Indonesia. In order to accommodate the event of the absence of the president and vice president together, a more complete arrangement is needed with the establishment of implementing regulations from Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the content material can be based on references from other countries that use the same concept.

Keyword: Triumvirate, Acting President.